

KABID. BINAGRAM

Mei - 20 699

Kue - 25 699



MEMBANGUN
MANUSIA KARYA

*

*

LAPORAN TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN : 1995/1996

*

*

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jalan Dukuh Menanggal 124-126 Telepon 8284078 - 8280254
SURABAYA





MEMBANGUN
MANUSIA KARYA

*

*

LAPORAN TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN : 1995/1996

*

*

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jalan Dukuh Menanggal 124-126 Telepon 8284078 - 8280254
SURABAYA

KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan Tahunan Tahun Anggaran 1995/1996 ini adalah untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 157/M/SJ/1984 Tanggal 01 Juni 1984.

Laporan ini merupakan cermin pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, yang didalamnya menggambarkan tentang hasil-hasil yang telah dicapai, permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya serta saran-saran.

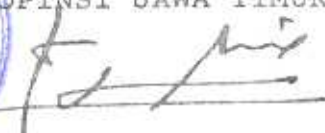
Buku laporan ini tersusun berkat kerjasama yang baik antar unit kerja dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

Namun tetap disadari bahwa laporan Tahunan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dari berbagai pihak diperlukan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Surabaya, April 1996



KAKANWIL DEPNAKER
PROPINSI JAWA TIMUR


MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN

NIP. 160008975

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI	
1. BAGIAN TATA USAHA	2
2. BIDANG BINAGRAM	5
3. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	9
4. BIDANG PENTA KERJA	12
5. BIDANG HUBIN SYAKER	16
6. BIDANG PENGAWASAN KK	20
7. BALAI AKAN	26
8. BALAI HYPERKES DAN KK	27
9. KEPANITERAAN P4D	29
10. BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH	31
BAB III : PERMASALAHAN DAN HAMBATAN	33
BAB IV : ANALISA DAN EVALUASI	38
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	47
B. SARAN	48

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga kerja No.Kep.157/M/SJ/1984, tanggal 01 Juni 1984, maka disusunlah Laporan Tahunan 1995/1996 yang meliputi kegiatan Rutin dan Pembangunan di jajaran Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur yang meliputi; 23 Kandepnaker, 1 Kadisnaker, 7 Balai, 1 Kepaniteraan P4D dan 12 KLK.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 1995/1996 ini tetap didasarkan pada kebijaksanaan Depnaker dalam Pelita VI SAPTA KARYATAMA, target dan petunjuk-petunjuk yang ada baik didalam DIP, DIK dan Petunjuk Operasionalnya, maupun petunjuk-petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatannya tetap memperhatikan pula hasil dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar dapat diutarakan bahwa program dan kegiatan tahun 1995/1996 cukup berhasil sesuai yang direncanakan. Bahkan untuk beberapa hal terjadi penonjolan-penonjolan yang berarti. Sebagai gambaran umum dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan Rutin sampai dengan akhir Tahun Anggaran 1995/1996 ini cukup memadai. Hal ini dapat dilihat alokasi dana sebesar Rp. 8.818.156.000,- telah dapat terealisasi sebesar Rp. 8.674.874.852,- sehingga realisasi fisik pelaksanaan tercapai sebesar 98,38%. 16/98.
2. Realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan Pembangunan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 1995/1996 cukup memadai, karena dari alokasi dana Rp. 11.009.649.000,- telah dapat direalisasi Rp. 10.442.854.759,- (94,85%) sedang fisik 100%. 11.464.474.430 / 12.628.810.012

Selanjutnya uraian secara lebih rinci dipaparkan dalam bab-bab berikutnya. Adapun sistematika penyusunan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut:

- 94.98.
- | | | | |
|-----|-----|---|---------------------------------|
| BAB | I | : | Pendahuluan |
| BAB | II | : | Kegiatan dan Hasil yang dicapai |
| BAB | III | : | Masalah/Hambatan |
| BAB | IV | : | Evaluasi |
| BAB | V | : | Kesimpulan dan Saran |

BAB II

KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI

1. Bagian Tata Usaha.

Promosi/Mutasi:

1. Jumlah Pegawai Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur :

- Golongan IV sebanyak : 47 orang
 - Golongan III sebanyak : 669 orang
 - Golongan II sebanyak : 1.094 orang
 - Golongan I sebanyak : 110 orang
-
- Jumlah : 1.920 orang

Dari jumlah tersebut terdaftar pejabat fungsional sebagai berikut :

- Instruktur Latihan Kerja : 428 orang
- Pengawas Ketenagakerjaan : 142 orang
- Pegawai Perantara : 99 orang

2. Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural 71 orang terdiri dari:

- Eselon II : 2 orang
- Eselon III : 15 orang
- Eselon IV : 53 orang
- Eselon V : 1 orang

3. Usul kenaikan Pangkat 856 orang terdiri dari:

- Gol II/d kebawah : 317 orang, Realisasi : 226 orang
(71,29 %)
- Gol III/a keatas : 539 orang, Realisasi : 281 orang
(52,13 %)

4. Pemindahan Pegawai 115 orang terdiri dari:

- Antar unit dilingkungan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur 77 orang.
- Dari luar Propinsi Jawa Timur 24 orang
- Keluar Propinsi Jawa Timur 14 orang

5. Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS sebanyak 13 orang terdiri dari :
- Golongan III : 4 orang
 - Golongan II : 6 orang
 - Golongan I : 3 orang
6. Usulan pemberhentian Pegawai 2 orang dan realisasi 1 orang, permintaan Karpeg 1 orang dan realisasinya 1 orang, permintaan Karis/Karsu 52 orang dan realisasinya 40 orang sedangkan usulan pemberian Tanda Penghargaan Kesetiaan sebanyak 135 orang dan realisasi 135 orang.
7. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UTPP 2 tahap.
- Tahap I : Ujian Dinas : 87 orang, Lulus : 82 orang
U T P P : 22 orang, Lulus : 22 orang
 - Tahap II : Ujian Dinas : 15 orang, Lulus : 14 orang
U T P P : - orang, Lulus : - orang
8. Pengembangan dan Pembinaan:
- a. Mengikuti Diklat sebanyak 182 orang.
 - b. Tindakan Disiplin Pegawai : 13 orang
 - Tingkat Ringan sebanyak : 4 orang
 - Tingkat Sedang sebanyak : 6 orang
 - Tingkat Berat sebanyak : 3 orang
 - c. Ijin Cuti Pegawai diberikan kepada 247 orang
9. Otonomi Daerah:
- Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8/1995 tanggal 21 April 1995, tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Dati II percontohan, maka untuk Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur telah ditunjuk Kandepnaker Sidoarjo untuk dijadikan sebagai Kandep Percontohan dengan perubahan status menjadi Kantor Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo.

Oleh karena itu telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 08 Januari 1996 seluruh pegawai pengawas ex Kandepnaker Sidoarjo sebanyak 9 orang telah ditarik ke Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur.
 - b. Bulan April 1996 Jabatan Kasi Pengawasan Kandepnaker Kabupaten Sidoarjo telah dicabut dan Jabatan Strukturalnya dialihkan ke Jabatan Fungsional dengan Surat Keputusan pemindahan No.Kep.582/Sj/KP-/1996 tanggal 13 Maret 1996.
 - c. Dengan berubahnya status Kandepnaker menjadi Kantor Dinas, maka segala fasilitas dan pegawai Golongan I dan II diserahkan kepada Kantor Dinas.
10. Arus surat selama Tahun Anggaran 1995/1996 telah tercatat sebagai berikut:

NO	JENIS SURAT	MASUK	KELUAR
1.	Surat Biasa	23.704	12.258
2.	Surat Penting	121	257
3.	Surat Rahasia	517	406
4.	Surat Ijin	133	-
5.	S S B	50	29
J U M L A H		24.525	12.950

Dalam pengelolaan surat menyurat dan ekspedisi telah tercatat surat keluar sebanyak 12.950 buah dengan biaya pengiriman Rp. 3.372.175,-

11. Dana yang diperoleh dari DIK sebesar Rp.8.818.156.000,- realisasi sampai Akhir Tahun Anggaran Maret 1996 Rp. 8.674.874.852,-atau 98,38% meliputi unit Kanwil, 23 Kandepnaker, 1 Kandisnaker, 7 Balai, 12 KLK dan Kepaniteraan P4D dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	DANA (RP)	REALISASI (RP)	SISA (Rp)
Bel. Pegw.	6.812.529.000	6.735.973.869	76.555.250
Bel. Barang	1.150.243.000	1.106.333.750	43.989.250
Bel. Pemelh.	772.957.000	750.599.368	22.357.632
Bel. Perjaln.	82.654.000	81.967.865	686.135
JUMLAH	8.818.383.000	8.674.874.852	143.508.148

12. Pemeliharaan peralatan kantor/barang inventaris 8 jenis sebanyak 24 unit. (lihat tabel 1).
13. Pemeliharaan gedung Kantor:
 - Pengecatan gedung Kantor 4.861,5 M2
 - Pengurukan Halaman Kantor 45 M3
 - Pengecatan Kusen 248 M2
15. Pengadaan Perlengkapan untuk untuk 14 jenis meliputi 66 unit. (lihat tabel 2).

2. Bidang Pembinaan Program.

Sesuai tugas Bidang Bina Program adalah melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, penyusunan informasi ketenagakerjaan daerah, penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah serta evaluasi dan laporan, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya ditunjang oleh anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

A. Kegiatan Rutin:

1. Menyusun dan mengkoordinir pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan unit terkait sebagai bahan Rakorbang Tingkat I Jawa Timur dan mengirimkan hasil Rakorbang ke Pusat.

Menyusun dan mengirimkan Lembar Kerja (LK) sebagai bahan konsultasi usulan Proyek ke Pusat.

Dan selanjutnya mengkoordinasi pelaksanaan Usulan dan Revisi DIP/PO, DIK/PO tingkat Daerah ke Tingkat Pusat.

2. Menyusun dan mengkoordinir pembuatan Renlakgiat Rutin dan Pembangunan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut yang meliputi kegiatan dari Bidang/Balai, Kepaniteraan P4D, Kandepnaker dan BLK/KLK. pada Tahun Anggaran 1995/1996 telah mencapai 100%, namun pembuatan Renlakgiat masih dibuat pertolok ukur dan belum keseluruhannya. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang pada Tahun Anggaran 1994/1995 belum diadakan.
3. Mengadakan kunjungan ke Perusahaan atau Instansi Pemerintah sebanyak 164 kunjungan. Maksud dari kunjungan tersebut untuk mendapatkan data yang menyangkut ketenagakerjaan. Hasil kunjungan dibuat laporan untuk dikirim ke pusat setiap bulan dan juga merupakan bahan atau materi informasi ketenagakerjaan yang penyebarluasaannya melalui Locket Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan, Instansi Pemerintah, Mass Media baik cetak maupun elektronik dan pengguna informasi lainnya.
4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menanggapi surat-surat yang masuk dari BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur serta Instansi terkait. Membuat laporan pertanggung-jawaban Gubernur bidang ketenagakerjaan, Sasaran Pelita, Konsep GBHN dan Penyampaian data ketenagakerjaan pada pihak III misalnya Komisi E DPR.
5. Menyusun Buku Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Pelita VI dan PJP II bersama-sama dengan BAPPEDA. Untuk Tahun Anggaran 1995/1996 dibuat sebanyak 50 buku dan ini merupakan penyempuraan dari buku RTKD Pelita VI dan PJP II yang telah disusun sebelumnya.
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh:
 - Tim Itjen 7 kali, meliputi 24 unit kerja.
 - Tim BPK 1 kali, meliputi 6 unit kerja.
 - Tim BPKP - kali.
 - Tim Wasmin/Wasop 7 kali, meliputi 9 unit kerja.

- Jumlah kasus yang masuk melalui PO.Box 5000 Tahun Anggaran 1995/1996 sejumlah 75 buah, sedangkan pada Tahun Anggaran 1994/1995 sejumlah 69 buah. Hal ini berarti mengalami kenaikan 8,69 persen disebabkan karena adanya peningkatan perselisihan industrial yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.
7. Menyelenggarakan Rakorda setiap triwulan sekali.
- Rakorda I : Diselenggarakan di Hotel Victory Malang pada tanggal 05 - 07 April 1995 dengan peserta Pejabat II, III dan IV Kanwil Depnaker, Kandepnaker, BLK/KLK, Kepala Kantor Cabang dan Perwakilan Astek se Jatim. Adapun hasil Rakorda tersebut ialah 4 perumusan program praktis operasional untuk mengantisipasi masalah ketenagakerjaan yang cukup menonjol yakni:
 1. Program antisipasi/penanggulangan pengiriman TKI ilegal.
 2. Program antisipasi/pencegahan unjuk rasa/pemogokan.
 3. Program pemagangan yang efektif dan efisien.
 4. Program peningkatan disiplin dan karier pegawai.
 - Rakorda II : Diselenggarakan di Hotel Bima Jember pada tanggal 12 - 14 Oktober 1995 dengan peserta Pejabat II, III dan IV Kanwil Depnaker, Kandepnaker, BLK/KLK, Kepala Kantor Cabang dan Perwakilan Astek se Jatim. Adapun hasil Rakorda kali ini menitikberatkan pada:

1. Terumuskannya hasil evaluasi program kegiatan selama kurun waktu April-September 1995 dalam Tahun Anggaran 1995/1996.
2. Tersusunnya program kegiatan prioritas untuk kurun waktu Oktober 1995 - Maret 1996.

- Rakorda III : Diselenggarakan di Hotel Safari Indah Kediri pada tanggal 03 - 05 Januari 1996 dengan peserta Pejabat II, III dan IV Kanwil Depnaker, Kandepnaker, BLK/KLK, Kepala Kantor Cabang dan Perwakilan Astek se Jatim.

Adapun Rakorda kali ini menghasilkan beberapa keputusan:

1. Tersusunnya data pelatihan di BLK/KLK se Jawa Timur.
 2. Diperoleh hasil Crass Program Pengawasan sarana HIP, KKP dan kepesertaan Jamsostek.
 3. Pemantapan program AKAN, konsep OTODA.
 4. Kesepakatan pelaksanaan PORDA/PORNAS.
8. Menyelenggarakan Rapim setiap hari Senin, sebagai materi/bahan diperoleh dari rekapitulasi hasil Rapim Kandepnaker se Jawa Timur yang perlu ditindaklanjuti Kanwil atau Pusat dan dari Bidang/Balai, Kepaniteraan P4D dan BLK Surabaya. Hasil Rapim dibuat Notulen dan Laporan untuk dikirim ke Pusat sejumlah 52 laporan melalui Fax.

9. Menyusun Buku Laporan Bulanan sejumlah 720 buku, Laporan Triwulan sejumlah 180 buku dan Laporan Tahunan sejumlah 60 buku yang berdasarkan rekapitulasi laporan dari Kandepnaker, Bidang/Balai Kependidikan P4D dan BLK/KLK se Jatim serta hasil kunjungan monitoring dan evaluasi.

B. Kegiatan Pembangunan:

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan melalui Bagian Proyek IPTK adalah:

1. Memperluas lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
2. Menyusun kebutuhan Tenaga Kerja dan Komoditi Unggulan.
3. Menyempurnakan sistim dan mekanisasi informasi ketenagakerjaan.
4. Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Proyek Pembangunan di tingkat Kanwil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas dilakukan berbagai kegiatan dengan didukung dana sejumlah Rp. 156.046.000,-.

Dari seluruh kegiatan Pembangunan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan pencapaian fisik 100,69 %, Keuangan 98,79 % dan SIAP 1,21 %. Terjadinya SIAP ini dikarenakan pelaksana proyek yang berada di tingkat Kandepnaker kesulitan untuk meng-SPJ-kan Mata Anggaran lain-lain.

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas

A. Kegiatan Rutin.

1. Latihan Pemagangan:

- a. Pembentukan tim TAS di BLK/KLK se Jawa Timur dengan program TAS meliputi:
 - Pengelola Pemagangan.
 - Teknik Pemasaran.
 - Sekretariat Tim TAS

Pada saat ini telah terbentuk 3 tim TAS yaitu :

1. BLK Surabaya.
2. BLK Wonojati.
3. BLK Singosari.

b. Mengadakan kemitraan dengan industri berupa:

- Penyuluhan program pemagangan.
- Bekerja sama dengan Dikbud Propinsi Jawa Timur untuk membantu pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang telah terbentuk di 13 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

c. Peserta Pelatihan Pemagangan

Jumlah peserta pelatihan pemagangan dalam tahun anggaran 1995/1996 mengalami kenaikan 250% yaitu dari 16 perusahaan menjadi 56 perusahaan untuk jumlah perusahaan yang ikut serta apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 1994/1995, hal ini menunjukkan adanya kemanfaatan peserta pemagangan bagi perusahaan. Sedangkan jumlah peserta pelatihan pemagangan dalam Tahun Anggaran 1995/1996 mengalami penurunan 39,20% yaitu dari 954 peserta menjadi 580 peserta dibandingkan dengan dalam Tahun Anggaran 1994/1995 secara lebih rinci (lihat Tabel 3).

d. Mengadakan Penyuluhan / Pembinaan di 16 BLK / KKK secara periodik dan untuk tahun ini sebanyak 53 kali.

2. Pembinaan Sertifikasi.

a. Dalam Tahun Anggaran 1995/1996 pemberian sertifikasi perijinan LLS jumlah LLS ⁷⁴²~~416~~ lembaga sedang dalam Tahun Anggaran 1994/1995 ⁶⁹³~~644~~ lembaga, hal ini berarti mengalami kenaikan 11,34%. (lihat Tabel 4). ₆₃₈

- b. Pemberian Akreditasi Swadana pada 46 LLS di Jawa Timur.
- c. Mengadakan UJK pada Calon Tenaga Kerja 792 orang, dan mengadakan UJK bagi peserta latihan LLS sejumlah ~~30.726~~^{57.549} orang, sedangkan pada Tahun Anggaran 1994/1995 UJK bagi peserta Latihan LLS hanya mencapai ~~14.363~~^{37.029} orang, berarti dalam tahun ini ada kenaikan 53,25%. Hal tersebut disebabkan karena: *karena 1,9 %*
- Penyuluhan makin intensif.
 - Kesadaran para penyelenggara latihan melihat arti pentingnya UJK. *Ref. R. Ekawati (Kurus)*
 - Berpengaruh terhadap pengupahan (khususnya perusahaan PMA). *di LLS.*
- d. Pembinaan terhadap HILLSI (DPD, DPC HILLSI) sebanyak ~~43~~⁴⁰ kali.
- e. Mengadakan ^{UJK!} Kerjasama dengan Pihak ke III dalam *kal in BLK-KLK* rangka pelaksanaan Permen 02/1987. *3184 orang*
3. Pembinaan Produktifitas Tenaga Kerja.
Mengadakan pemantauan AMT di BLK/KLK/LLS/Ponpes sebanyak 211 paket dengan 3.375 orang.
4. Pembentukan UP3.
Jember 20 orang, Malang 20 orang, Kediri 20 orang, Madiun 20 orang dan Pasuruan 20 orang.
5. Pembinaan Instruktur BLK/KLK/BPPD sejumlah 428 orang yang meliputi berbagai kejuruan.
6. Pembinaan Instruktur LLS sejumlah 4.560 orang.

B. Kegiatan Pembangunan.

- Pelaksanaan Pelatihan

Bidang Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja melaksanakan latihan T.A. 1995/1996 sejumlah 6.880 orang. Sedangkan pada T.A. 1994/1995 sejumlah 7.547 orang berarti dalam kegiatan mengalami penurunan 8,84 % karena disesuaikan dengan dana yang tersedia.

- Penempatan Ex Peserta Pelatihan.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap ex peserta pelatihan BLK/KLK T.A. 1995/1996 dapat ditempatkan sejumlah 1.597 orang di berbagai instansi, sedangkan pada T.A. 1994/1995 berhasil ditempatkan sejumlah 3.261 orang berarti adanya penurunan sebesar 51,03 %. Hal ini disebabkan karena banyaknya peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan tidak melapor.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

A. Kegiatan Rutin.

1. Informasi Bursa kerja Terpadu.

a. Kegiatan Penempatan tenaga kerja.

Kegiatan rutin penempatan ditekankan pada penempatan pencari kerja dan pemenuhan lowongan yang terdaftar melalui prosedur Antar Kerja Umum, Antar Kerja Khusus dan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Hasil yang telah dicapai :

1. Antar Kerja Umum.

- Lowongan Terbuka	=	99.389	orang
- Pencaker Aktif	=	589.427	orang
- Penempatan	=	54.495	orang
- Penghapusan Pencaker	=	350.448	orang
- Penghapusan Pencaker yang sudah ditempatkan.	=	184.484	orang
- Lowongan yang belum dipenuhi	=	20.874	orang
- Lowongan dihapuskan	=	24.020	orang

2. Perijinan Tenaga Kerja Asing.

- TKA Domestik

Baru	=	34 (10)	orang
Perpanjangan	=	148 (20)	orang
Pindah Jabatan	=	-	orang
Jumlah	=	184 (30)	orang

- TKWNP

Baru	=	510	orang
Perpanjangan	=	284	orang
Pindah Jabatan	=	2	orang
Jumlah	=	796	orang

b. Penyaluran tenaga kerja.

1. Kegiatan Penyaluran Tenaga Kerja ditekankan pada kegiatan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK), Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ) dan Kampanye Analisis Jabatan.

a. Bursa Kerja Khusus (BKK) :

- Jumlah Satuan pendidikan Menengah dan Tinggi yang telah mengikuti pemanduan Bursa Kerja 188 unit dengan jumlah peserta 352 orang.
- Jumlah Satuan pendidikan Menengah dan Tinggi yang telah membentuk Bursa Kerja Khusus 81 unit dengan jumlah petugas 165 orang.
- Jumlah Lembaga Pelatihan yang telah mengikuti pemanduan Bursa Kerja 28 unit dengan jumlah peserta 32 orang.
- Jumlah Lembaga Pelatihan yang telah membentuk Bursa Kerja Khusus 9 unit dengan jumlah petugas 10 orang.
- Jumlah Pencaker terdaftar di BKK di satuan pendidikan Menengah dan tinggi pada 63 unit 29.404 orang.

- Jumlah lowongan terdaftar di BKK di satuan pendidikan Menengah dan tinggi pada 63 unit 3.607 orang.
- Jumlah penempatan terdaftar di BKK di satuan pendidikan Menengah dan tinggi pada 63 unit 2.387 orang.
- Jumlah Pencaker terdaftar di BKK di satuan Lembaga pelatiba kerja pada 6 unit 387 orang.
- Jumlah lowongan terdaftar di BKK di satuan Lembaga pendidikan pada 6 unit 152 orang.
- Jumlah penempatan terdaftar di BKK di satuan Lembaga pendidikan pada 6 unit 39 orang.

b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan:

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan dilaksanakan dengan obyek sasaran kepada:

- Pencari Kerja dalam rangka untuk mengisi lowongan pekerjaan baik AKL, AKAD, AKAN.
- Pencari Kerja yang akan mengikuti latihan ketrampilan, khususnya pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK/KLK.
- Siswa sekolah/latihan dalam rangka study lebih lanjut maupun memilih latihan kerja.

c. Kampanye Analisa Jabatan :

Untuk memasyarakatkan penggunaan analisa jabatan kepada masyarakat industri maka telah dilaksanakan kampanye analisa jabatan kepada para pengusaha di 4 Kandeptaker yaitu Kandeptaker Sidoarjo, Kandeptaker Malang, Kandeptaker Madiun dan Kandeptaker Surabaya.

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Kegiatan Proyek Perluasaan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran (PLKPP) Propinsi Jawa Timur.

a. Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.

Sasaran proyek ditekankan pada pencapaian target pada DIP/PO T.A 1995/1996 melalui kegiatan penempatan AKL, AKAD, Penempatan Motivator Transmigrasi (PMT), TK-PENCA, Pemanduan Penempatan TK-MUDA melalui kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan Hubungan Industrial (BJHI) kepada Guru BP dan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK), Kegiatan Pelatihan Kader Pelatih Ketrampilan Tenaga Kerja Wanita serta Penyuluhan dan Pembinaan Bagi Pengguna TKWNAP.

Adapun hasil yang dicapai:

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
a.	AKAL	14.150 Org	14.150 Org	100,00
b.	AKAD	15.000 Org	15.100 Org	100,66
c.	PMT	190 Org	183 Org	96,31
d.	TK-PENCA	60 Org	35 Org	58,33
e.	TK Muda BJHI	30 Org	30 Org	100,00
f.	Wanita	20 Org	20 Org	100,00
g.	TKWNAP	50 Org	50 Org	100,00
h.	AKAN	20.000 Org	24.619 Org	123,10

b. Kegiatan Penyaluran Tenaga Kerja:

Sasaran kegiatan Penyaluran Tenaga Kerja ditekankan pada kegiatan: Informasi Pasar Kerja, Pemanduan Bursa Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan serta Analisis Jabatan.

Adapun hasil yang dicapai:

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
a.	IPK (Berita Pasar Kerja)	1.200 buku	1.200 buku	100
b.	Pemanduan Bursa Kerja	30 org.	30 orang	100
c.	Penyuluhan	3.000 org	3.136 orang	105
d.	Pengumpulan dan Pengolahan Data (Analisis Jabatan)	30 jab.	30 jab.	100

c. Kegiatan Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri dan Perluasan Kerja.

Baik kegiatan Rutin/Pembangunan yang diarahkan pada upaya perluasan lapangan kerja melalui penciptaan kesempatan berusaha bagi angkatan kerja terdidik dalam Tahun Anggaran 1995/1996 ini dari kegiatan tersebut dapat menyerap 350 orang terdiri dari 39 TKPMP IDT dan 311 TKMT.

Persiapan TPK sebanyak 24 unit menyerap 600 tenaga kerja langsung serta penciptaan usaha produktif 5 unit dapat menyerap 100 orang.

5. Bidang Hubungan Ketenagakerjaan dan Syarat Kerja.

A. Kegiatan Rutin.

1. Pembentukan dan Pembinaan sarana HIP dalam Tahun Anggaran 1995/1996 sebagai berikut :

a. Pembentukan Unit Kerja SPSI sebanyak 83 Unit, atau mengalami kenaikan 142,85% dibandingkan Tahun Anggaran 1994/1995. Dengan demikian UK SPSI yang ada sampai dengan laporan ini dibuat berjumlah 1.877 Unit.

Sedangkan SPTP yang terbentuk tahun ini sebanyak 54 unit, sehingga jumlah SPTP hingga saat ini sejumlah 77 unit.

- b. Penyuluhan dan pembentukan LKS Bipartite sebanyak 38 unit sehingga jumlah sampai dengan saat ini 1006 unit.
 - c. Pembinaan dan pembentukan Koperasi karyawan te-realisir sebanyak 50 unit, sehingga jumlahnya saat ini 965 unit Kopkar.
 - d. Pembentukan KKB dalam tahun ini sebanyak 166 KKB, atau meningkat 3,52% dibandingkan tahun lalu, sehingga jumlah KKB hingga saat ini 1.235 KKB.
 - e. Pembentukan Peraturan Perusahaan dalam tahun ini sebanyak 197 buah, sehingga jumlah secara keseluruhan saat ini 3.658 buah PP.
2. Kegiatan pendidikan hubungan ketenagakerjaan dalam tahun ini sebagai berikut:
- a. P4. HIP = 26 kali, peserta 780 orang
 - b. HIP = 43 kali, peserta 1.290 orang
 - c. Lain-lain = 34 kali, peserta 1.020 orang
 - d. KB.Kerja = 137 perusahaan
3. Penyelesaian kasus PHI/PHK dalam tahun ini sbb:
- a. Kasus PHI (UU. No. 22 Tahun 1957)
 - Jumlah kasus masuk = 111 kasus
 - Jumlah kasus selesai = 74 kasus
 - Sisa kasus = 37 kasus
 (lihat Tabel 5)
 - b. Kasus PHK (UU. No. 12 Tahun 1964)
 - Jumlah kasus masuk = 863 kasus
 - Jumlah kasus selesai = 503 kasus
 - Sisa kasus = 360 kasus
 (lihat Tabel 5)
 - c. Kasus PHK massal
 - Jumlah kasus masuk = 16 kasus/ 1.677 orang
 - Jumlah kasus selesai = 2 kasus/ 54 orang
 - Sisa kasus = 14 kasus/ 1.623 orang

Sisa kasus perselisihan tersebut diatas masih dalam proses pemerantaraan, P4D maupun proses di P4P. (lihat Tabel 6)

4. Jumlah kasus unjuk rasa yang terjadi pada Tahun Anggaran 1995/1996 sebanyak 193 kasus, atau menurun 23,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang terlibat 84.659 orang menurun 38,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian jam kerja yang hilang mengalami peningkatan 16,12% dari tahun yang lalu, yaitu 1.239.147 jam. (lihat Tabel 7). Jenis tuntutan sebagai berikut:

a. Normatif:

- Pengupahan/UMR	=	78 kasus
- Jamsostek	=	61 kasus
- Lembur	=	43 kasus
- Cuti Haid	=	43 kasus
- Cuti Hamil/melahirkan	=	18 kasus
- Cuti Tahunan	=	37 kasus
- PP / KKB	=	19 kasus
- T H R	=	40 kasus

b. Non Normatif:

- UK SPSI	=	40 kasus
- Uang transport	=	19 kasus
- Uang makan	=	31 kasus
- Lain-lain	=	113 kasus

Dalam hal peta kerawanan maka berdasarkan data perusahaan telah termonitor sebagai berikut:

- Perusahaan rawan	=	302 Perusahaan
- Perusahaan setengah rawan	=	989 Perusahaan
- Perusahaan mantap	=	4.022 Perusahaan

5. Lain - lain.

- a. Pertemuan - pertemuan LKS Tripartite Daerah Tingkat I sebanyak 24 kali dan sidang pleno 2 kali dan menghasilkan 5 kesepakatan bersama Tripartite.

b. Operasionalisasi Komisi Pengupahan Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka :

- Pemantauan Tingkat KFM/KHM.
- Rekomendasi penangguhan UMR dan THR, dalam hal ini selama T.A 1995/1996 terdapat permohonan penangguhan UMR sebanyak 59 perusahaan (diberi ijin 4 perusahaan, ditolak 51 perusahaan dan 5 perusahaan dicabut oleh perusahaan. Sedangkan untuk penyimpangan THR sebanyak 12 perusahaan.

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Pada Tahun Anggaran 1995/1996 kegiatan monitoring UMR sebanyak 300 perusahaan dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan petugas Kanwil = 72 Perusahaan
 - b. Komisi Pengupahan = 6 Perusahaan
 - c. Dilaksanakan Kandepnaker = 228 Perusahaan
2. Mengadakan Penataran Aspek Kesejahteraan dengan peserta 40 orang dari 23 Kandepnaker, 1 Kandisnaker dan Kantor Wilayah.
3. Mengadakan Penyuluhan Syarat-syarat Kerja di BUMN-BUMD dengan peserta sebanyak 30 perusahaan.
4. Mengadakan Penyuluhan PP/KKB terhadap 200 perusahaan dan pelaksanaan penyuluhan seluruhnya dilaksanakan di 13 Kandepnaker.
5. Mengadakan bimbingan peningkatan kemampuan pegawai dan pembantu Perantara sebanyak 30 orang selama 5 hari di Surabaya.
6. Menghimpun atau menginventarisasi data kerawanan perusahaan sebanyak 100 perusahaan di wilayah Kandepnaker Jawa Timur.
7. Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial dilapangan sebanyak 50 kasus dari 5 Kandepnaker di Jawa Timur telah dilaksanakan sesuai dengan target proyek.

8. Mengadakan pengolahan data perusahaan rawan di Jawa Timur sebanyak 1000 perusahaan dari 10 Kandeptaker dengan catatan bahwa data yang masuk tepat waktu hanya 8 Kandeptaker dengan 775 perusahaan, sedang 2 Kandeptaker terlambat memberikan laporannya. (lihat Tabel 8).
9. Membentuk tim diteksi dini untuk memantau pelaksanaan UMR di Perusahaan yang rawan. Menginventaris data kerawanan di 100 perusahaan dari 11 Kandeptaker se Jawa Timur, dengan tujuan sebagai kajian agar dapat diketahui sumber-sumber kerawanan perusahaan sehingga dapat dicegah secara dini.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

A. Kegiatan Rutin.

1. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU. No. 7/1981).
Berdasarkan UU.No.7/1981, jumlah perusahaan yang telah terdaftar sampai Maret 1996 adalah 25.143 perusahaan dengan tenaga kerja 1.412.406 orang. Dibandingkan dengan jumlah perusahaan pada Tahun Anggaran 1994/1995 jumlah perusahaan yang terdaftar 23.852, berarti mengalami kenaikan 5,13%.
2. Pemeriksaan.
Untuk mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, selama tahun 1995/1996 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap perusahaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebanyak 8.133 kali pemeriksaan. Dibandingkan Tahun Anggaran 1994/1995 pemeriksaan dilakukan sebanyak 7.713 kali, berarti mengalami kenaikan 5.45%. Hal tersebut karena aktivitas pegawai pengawas meningkat disertai dengan laporan yang teratur dan tepat waktu dari daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditemukan adanya pelanggaran sejumlah 9.615.

Kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran telah diadakan pembinaan.

Jumlah Berita Acara Projustitia yang dikeluarkan:

B A P tahun 1995/1996 : 17 buah

B A P tahun 1994/1995 : 46 buah

Penindakan terhadap pelanggaran tahun 1995/1996 mengalami penurunan 111,5%, hal ini disebabkan:

- Bahwa Tahun 1994/1995 adalah sebagai tahun Berita Acara, sehingga penyidik Pegawai Negeri Sipil aktif menindak perusahaan yang tidak mentaati peraturan perundangan ketenagakerjaan.
- Pembinaan yang secara aktif dan berkesinambungan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan sehingga tumbuhnya kesadaran pihak perusahaan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

3. Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan kerja yang terjadi dalam Tahun Anggaran 1995/1996 berjumlah: 6.514 (berdasarkan UU. No. 3/1992). Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 1994/1995 jumlah kecelakaan kerja 3.315 ini berarti mengalami kenaikan 96,5%, hal tersebut dikarenakan:

- Kesadaran dari pihak perusahaan untuk melaporkan setiap adanya kecelakaan kerja kepada Depnaker dan kepada PT. Jamsostek yang dikaitkan dengan kepesertaan dalam program Jamsostek.
- Laporan kecelakaan tahun 1995/1996 lebih teratur dan tepat waktu sehingga laporan kecelakaan dapat dicatat dengan baik.

4. Jamsostek.

- a. Target perusahaan 1995 sejumlah 1.633 baru terealisasi 818 perusahaan (Januari s/d Desember). Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDSTK) meningkat kepesertaannya dari target yang dicapai untuk tahun 1995 sejumlah 211.783 tenaga kerja, telah terealisasi

244.806 tenaga kerja pada tahun yang sama, berarti mengalami kenaikan melebihi target 15,59%.

- b. Tahun 1996 target kepesertaan diprioritaskan pada perlindungan tenaga kerja, untuk target kepesertaan tahun 1996 sejumlah 2.226 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 267.664 orang, sampai dengan bulan Maret 1996 sudah mencapai 152 perusahaan dengan tenaga kerja 25.859 orang (Januari s/d Maret 1996).
 - c. Jumlah komulatif perusahaan dan tenaga kerja pada tahun 1995 7.496 perusahaan dan 1.080.095 tenaga kerja, sedangkan sampai dengan bulan Maret 1996 sudah tercapai sejumlah 7.668 perusahaan dan 1.100.968 tenaga kerja.
5. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Jumlah P2K3 naik 113 buah dari target pembentukan 145 buah. Kekurangan 15% disebabkan laporan teknis pembentukan dari perusahaan belum dapat dilaporkan sedangkan pembentukannya sudah dilaksanakan. Dengan demikian jumlah P2K3 yang terbentuk hingga saat ini 2.168 unit.
 6. Pelayanan kesehatan kerja, pengesahannya menurun 5 buah. Namun perusahaan baru yang melaksanakan bertambah, sedangkan beberapa perusahaan yang lama, belum memperbarui permohonan penyelenggaraan.
 7. Pemberian Penghargaan terhadap perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan (Zero Accident) dalam tahun ini 9 perusahaan atau bertambah untuk 2 perusahaan dari tahun 1994/1995.
 8. Perijinan dibidang Keselamatan Kerja.
Perijinan dibidang Keselamatan Kerja meliputi: pesawat uap, Bejana Tekan, Pesawat Angkat, Instalasi Listrik Pemakaian Diesel dan Pengesyahan instalasi Kebakaran yang pada umumnya mengalami kenaikan (Lihat Tabel 9). Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan Pegawai Spesialis (uap, mekanik, listrik dan kebakaran) dan semakin aktifnya pihak ke III untuk melakukan dan

melaporkan hasil pemeriksaan serta ditunjang upaya penyelesaian di tingkat Kanwil yang semakin profesional.

9. Pembinaan Pegawai Pengawas.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis pegawai pengawas telah dilaksanakan beberapa upaya antara lain :

- Pembinaan langsung ke Kandepnaker baik pembinaan teknis dan maupun pembinaan administratif.
- Dilaksanakan lokakarya untuk tahun 1995 - 1996, telah dilaksanakan 2 kali lokakarya yaitu pada bulan Nopember 1995 dan bulan Maret 1996. Lokakarya direncanakan dilaksanakan secara periodik setiap 4 bulan sekali dengan membahas 4 buah makalah (setiap kali kegiatan).

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Kegiatan PHI dan PTK Tahun Anggaran 1995/1996 Jawa Timur untuk kegiatan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sampai akhir Tahun Anggaran dapat disampaikan fisik 100% keuangan 100% dengan catatan ada beberapa kegiatan fisik yang sedang dalam proses seperti:

- a. Pembentukan P2K3 di Kandepnaker dari target 135 P2K3 realisasi fisik di Kanwil 63 P2K3 (45%).
 - b. Perhitungan SR & FR (Tingkat keparahan dan tingkat kekerasan) di 10 Kandepnaker baru dilaporkan 1 Kandepnaker (Probolinggo).
 - c. Sedangkan ada kegiatan pembuatan BAP yang terpaksa tidak dapat memenuhi target (SIAP). Target 45 BAP, Realisasi 23 BAP.
 - d. Kegiatan PHI & PTK TA. 1995/1996 lainnya adalah:
 - a. Bimbingan Teknis Pegawai Pengawas KK
 - Target : 80 Pegawai Pengawas
 - Realisasi : 80 Pegawai Pengawas
- Diselenggarakan di Batu dari tanggal 29 Agustus 1995 s/d 31 Agustus 1995.

- b. Peningkatan fungsi P2K3 di Perusahaan.
 - Target : 80 Pengurus/Anggota P2K3
 - Realisasi : 80 Pengurus/Anggota P2K3
(dari 34 perusahaan)
 - c. Lomba cepat tepat ketenagakerjaan satu kali kegiatan diikuti oleh 9 perusahaan.
Diselenggarakan tanggal 15 Desember 1995 bertempat di BLK Surabaya dengan peserta perusahaan dari Kandeptaker: Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, Madiun, Mojokerto, Kediri, Probolinggo dan Gresik.
 - d. Kadarkum bagi masyarakat industri satu kali kegiatan dengan target 25 perusahaan @ 3 orang dan realisasinya 25 perusahaan @ 3 orang diselenggarakan di perusahaan PT. Ardi Indah Surabaya tanggal 18 Januari 1996.
 - e. Pemeriksaan kasus 75 perusahaan meliputi kasus-kasus yang terjadi di Kandept: Pasuruan, Mojokerto, Malang, Jombang, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Bangkalan, Probolinggo, Gresik, Surabaya, Bojonegoro dan Sidoarjo.
 - f. Pelatihan pembentukan kader norma kerja dengan peserta 25 orang pegawai pengawas dilaksanakan di Batu dari tanggal 29 - 31 Agustus 1995.
 - g. Monitoring kegiatan lembaga swadaya masyarakat yang mengelola anak yang terpaksa bekerja di daerah Malang, Jember dan Surabaya.
2. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Jawa Timur Tahun Anggaran 1995/1996, kegiatannya meliputi:
- a. Pelatihan Kader Pelatih Fasilitator satu kali, target 50 orang, realisasi 58 orang, diselenggarakan di BIP Surabaya dari tanggal 30 Agustus - 1 September 1995.

b. Pelatihan Pelatih Pengelola TPA dan Peningkatan Pengguna ASI 2 kali terdiri:

1. Penyelenggara Pusat:

- Target : 30 orang

- Realisasi : 30 orang

peserta dari Yayasan, LSM, Pegawai Pengawas diselenggarakan tanggal 27 - 29 Nopember 1995 di Gedung PKK Surabaya.

2. Penyelenggara Daerah :

- Target : 50 orang

- Realisasi : 50 orang

peserta dari Yayasan, LSM, diselenggarakan tanggal 10 - 12 Oktober 1995 di Gedung PKK Surabaya.

c. Pelatihan Kader Pelatih Ketrampilan.

- Target : 20 orang

- Realisasi : 20 orang

peserta dari Yayasan, LSM, diselenggarakan di Gedung IP2TP, tanggal 11 - 16 Desember 1995.

3. Kegiatan Pusat Tahun Anggaran 1995/1996.

Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam menangani masalah anak yang terpaksa bekerja, sebagai pelaksana Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur.

- Target : 30 orang Pegawai Pengawas

- Realisasi : 30 orang Pegawai Pengawas

Diselenggarakan di Grand Park Hotel Surabaya dari tanggal 04 sampai dengan 09 Desember 1995.

7. Balai AKAN.

1. Penempatan Tenaga Kerja di luar Negeri.

Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja di Jawa Timur melalui program Ekspor Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri (EJTKLN) pada Tahun Anggaran 1995/1996 mengalami kenaikan ^{16,06} ~~58,03~~ % yaitu dari ^{24.610} ~~17.834~~ orang menjadi 24.610 orang dibandingkan pada Tahun Anggaran 1994/1995, hal ini disebabkan karena penyuluhan yang dilakukan oleh petugas sehingga kesadaran masyarakat makin meningkat dan informasi tentang keberhasilan para TKI yang mendorong timbulnya keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya melalui program EJTKLN.

2. Pembinaan kepada petugas perwakilan PJTKI.

Melakukan pembinaan dan bimbingan secara periodik kepada petugas dari Kantor Perwakilan PJTKI, yang pada Tahun Anggaran 1995/1996 mengalami kenaikan ^{32,35} ~~100~~ % yaitu dari ³⁹ ~~1326~~ perwakilan PJTKI menjadi 39 perwakilan PJTKI dibandingkan pada Tahun Anggaran 1994/1995.

3. Pelatihan Pialang Tenaga Kerja.

Dengan meningkatnya animo masyarakat untuk turut serta dalam program EJTKLN dan mencegah adanya pengiriman CTKI ilegal maka melalui Kegiatan Pembangunan diadakan kegiatan Pelatihan Pialang Tenaga kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Program Ekspor Jasa Tenaga Kerja Indonesia, yang pada Tahun Anggaran ini telah menyelesaikan ⁵ ~~3~~ Angkatan dengan jumlah peserta ²⁶⁷ ~~167~~ orang.

4. Pelatihan Pelaksana Penyedia Calon Tenaga Kerja Indonesia (PPCTKI).

Mengadakan pelatihan kepada Pelaksana Penyedia Calon Tenaga Kerja Indonesia (PPCTKI) kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan program EJTKI khususnya bagi petugas PJTKI. Dalam Tahun Anggaran 1995/1996, diadakan ⁸ ~~2~~ angkatan dengan jumlah peserta ²⁵⁴ ~~61~~ orang.

5. Petugas Penyelidik

26 ^{Angkatan} ~~Angkatan~~ 254
Kegiatan pelatihan seluruh petugas EJTKI
Tenaga 120 orang. Sign. and present = Dep. Tenaga Kerja
6. Tenaga TKI ke luar negeri

8. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Jawa Timur.

A. Kegiatan Rutin.

Dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kesehatan Tenaga Kerja Balai Hiperkes melakukan kegiatan monitoring lingkungan yaitu:

1. Pengukuran intensitas kebisingan pada Tahun Anggaran ^{1996/1997} 1995/1996 mengalami kenaikan pada jumlah perusahaan 17,74 % atau ⁹¹ ~~73~~ perusahaan, sedang Tahun Anggaran 1994/1995 mengalami kenaikan 62 perusahaan, tetapi lokasinya mengalami penurunan 3,05 % atau 350 lokasi dan perusahaan yang melebihi nilai ambang batasnya mengalami penurunan 88 lokasi atau 66,67 % dibandingkan Tahun Anggaran 1994/1995 sampai mencapai 132 ¹²⁰ ~~lokasi~~ dari 361 lokasi.
2. Pengukuran intensitas cahaya dilakukan terhadap ⁸⁵ ~~63~~ perusahaan, hal ini mengalami kenaikan ²² ~~1~~ perusahaan dibandingkan Tahun Anggaran 1994/1995 ^{1495/1996} ~~62~~ perusahaan. Untuk ⁴⁵¹ ~~291~~ lokasi, sedang lokasi yang tidak sesuai dengan standarnya ^{36,59} ~~85~~ % lokasi mengalami ^{1995/1996} ~~penurunan~~ ^{kenaikan} 12,37 % yang pada Tahun Anggaran 1994/1995, ²⁹¹ ~~97~~ lokasi dari 298 lokasi yang diadakan penurunan.
3. Pengukuran iklim kerja, pada ^{1996/1997} 1995/1996 dilakukan terhadap ⁹² ~~235~~ lokasi ^{40,30} ~~72~~ perusahaan, hal ini mengalami kenaikan 16,13 % yang dalam Tahun Anggaran 1994/1995 dilakukan terhadap ²³⁰ ~~230~~ lokasi dari ²³⁵ ~~62~~ perusahaan sedang lokasi yang tidak sesuai dengan nilai ambang batas ⁴⁸ ~~33~~ lokasi Tahun Anggaran 1994/1995 ^{1995/1996} ~~48~~ lokasi. ^{1996/1997} ~~47~~.

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Kegiatan Pengembangan Higiene dan kesehatan kerja.

- a. Pengujian Ergonomi, Lingkungan dan Kecelakaan Kerja di Industri.

1. Pengujian tingkat penerangan 100 lokasi (100%).

3. Pengujian ²⁷ ~~27~~ lokasi -
Pengujian kerja telah mencapai 100 %
4. Pengujian Tingkat Penerangan
Pengujian Tingkat Penerangan telah mencapai 100 %

2. Pengujian iklim kerja di Industri kecil 100 lokasi (100%).
 3. Pengujian penerapan prinsip-prinsip ergonomi 100 orang (100%).
 4. Pengujian pengaruh paparan debu 100 orang (100%).
 5. Pengujian pengaruh faktor kimia 100 orang (100%).
 6. Pemeriksaan kesehatan kerja dan foto torak 100 orang (100%).
- b. Bimbingan Teknis Hiperkes dan Penanggulangan HIV/AIDS di Sektor Rawan.
- Telah dilaksanakan bimbingan teknis Hiperkes dan penanggulangan HIV/AIDS di sektor rawan 150 orang (100%).
2. Kegiatan Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Terpadu.
- Kegiatan ini meliputi:
- a. Pemeriksaan kesehatan fisik, kadar HB dalam darah dan telur cacing dalam tinja dan antropometri.
 - b. Pemeriksaan lingkungan kerja iklim kerja intensitas kebisingan dan pencahayaan.
- C. Pelayanan Jasa.
- Melayani pengukuran faktor kimia (Ambien, Emisi dan Lingkungan Kerja) dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak pada sektor.
1. Sektor Industri Pengolahan.
 2. Sektor listrik gas dan air, pada sub sektor industri listrik (ambien dan emisi) lihat tabel 10 terlampir.

9. Kepaniteraan P4D.

A. Kepaniteraan Perkara.

Penanganan masalah/perkara :

- Menurut UU No. 22/1957

Sisa perkara s/d akhir Maret 1995 : ~~8~~ 16 perkara

Perkara yang masuk Maret 1996 : ~~22~~ 24 perkara

Jumlah : ~~40~~ 40 perkara

Perkara yang diputuskan/diselesaikan s/d Maret 1996 : ~~21~~ 32 perkara

Sisa perkara s/d akhir Maret 1996 : ~~2~~ 8 perkara

- Menurut UU No. 12/1964

Sisa perkara s/d akhir Maret 1995 : ~~76~~ 76 perk, ~~97~~ 61 TK

Perkara yang masuk s/d Maret 1996 : ~~339~~ 339 perk, ~~433~~ 447 TK

Jumlah : ~~415~~ 475 perk, ~~530~~ 538 TK

Perkara yang diselesaikan s/d Maret 1996 : ~~362~~ 372 perk, ~~469~~ 425 TK

Sisa perkara s/d akhir Maret 1996 : ~~63~~ 63 perk, ~~61~~ 86 TK

- oleh pihak pengusaha : 41 Perkara

- oleh pihak pekerja : 20 perkara

- oleh pihak pengusaha dan pekerja : 4 perkara

Jumlah 65 perkara

Perkara yang masuk ke persidangan (UU No. 12/1964).

a. Menurut Daerahnya

- Surabaya : ~~86~~ 92 kasus : ~~105~~ 131 tenaga kerja

- Mojokerto : ~~4~~ 26 kasus : ~~26~~ 26 tenaga kerja

- Malang : ~~65~~ 34 kasus : ~~81~~ 51 tenaga kerja

- Pasuruan : ~~7~~ 16 kasus : ~~8~~ 17 tenaga kerja

- Kediri : ~~3~~ 1 kasus : ~~3~~ 1 tenaga kerja

- Madiun : ~~16~~ 10 kasus : ~~21~~ 10 tenaga kerja

- Bojonegoro : ~~3~~ 16 kasus : ~~3~~ 16 tenaga kerja

- Pamekasan : ~~10~~ 5 kasus : ~~10~~ 5 tenaga kerja

- Tuban : ~~5~~ 5 kasus : ~~5~~ 5 tenaga kerja

- Gresik : ~~50~~ ⁴⁴ kasus : ~~51~~ ⁵² tenaga kerja
- Tulungagung : ~~1~~ ² kasus : ~~1~~ ² tenaga kerja
- Sidoarjo : ~~20~~ ⁸⁵ kasus : ~~28~~ ⁸⁹ tenaga kerja
- Probolinggo : ~~15~~ ²⁹ kasus : ~~15~~ ³⁰ tenaga kerja

b. Menurut Sektor Usahanya

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan dan perikanan : ~~3~~ ³ kasus, ~~3~~ ³ Tk
2. Serta pertambangan dan penggalan : -- kasus, -- Tk
3. Sektor industri pengolahan : ~~253~~ ²⁷¹ kasus, ~~324~~ ³⁴⁹ Tk
4. Sektor listrik, gas dan air : ~~4~~ ⁴ kasus, ~~6~~ ⁶ Tk
5. Sektor bangunan : ~~30~~ ¹⁵ kasus, ~~41~~ ¹⁷ Tk
6. Sektor perdagangan besar, eceran dan rumah makan serta hotel : ~~30~~ ¹⁵ kasus, ~~35~~ ¹⁷ Tk
7. Sektor angkutan, penggudangan dan komunikasi : ~~42~~ ⁴² kasus, ~~60~~ ⁶⁰ Tk
8. Sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan : ~~8~~ ¹⁶ kasus, ~~10~~ ¹⁶ Tk
9. Sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan : ~~10~~ ¹² kasus, ~~14~~ ¹⁴ Tk
10. Sektor kegiatan lain yang belum jelas batasnya : -- kasus, -- Tk

c. Penyebab PHK dari kasus yang telah diputus.

1. Menejemen : ~~43~~ ⁴² perkara : ~~93~~ ⁷⁵ Tk.
2. Kontrak selesai : ~~10~~ ¹⁰ perkara : ~~45~~ ²⁵ Tk.
3. Indisipliner : ~~218~~ ²²² perkara : ~~258~~ ²²⁴ Tk.
4. Lain-lain : ~~101~~ ⁹⁶ perkara : ~~118~~ ¹¹⁸ Tk.

- Registri, Lain : 96 118
1. Perumahan, rumah & Bata ulang. Pda
Luaran No 9630
 2. Perumahan, rumah & Bata ulang. Pda
Luaran No 9630
 3. Studi banding 242. & Bata ulang. Pda

10. Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD)

A. Kegiatan Rutin

Pelatihan.

Dalam Tahun Anggaran 1995/1996 mengadakan pelatihan Manajemen dan Motivasi Produktivitas kepada 6 kelompok dengan jumlah peserta 150 orang, pelatihan Manajemen dan partisipasi kepada 3 kelompok dengan jumlah peserta 150 orang.

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Penyuluhan Produktivitas.

- a. Mengadakan pemberian Penghargaan Anugrah Produktivitas (Siddhakarya) kepada 6 Perusahaan Menengah dan Kecil.
- b. Mengadakan penyuluhan produktivitas di 5 sektor yaitu Industri, Jasa, Pertanian, Perdagangan dan Pendidikan.

2. Konvensi Mutu dan Produktivitas.

Mengadakan Konvensi Mutu dan Produktivitas di Surabaya yang diikuti oleh pengusaha se Jawa Timur sejumlah 150 orang.

3. Peningkatan Tenaga Ahli dan Kader Produktivitas.

- a. Mengadakan pelatihan kader produktivitas yang diikuti 5 perusahaan.
- b. Mengadakan pelatihan manajemen usaha di 3 Daerah Tingkat II yaitu Madiun, Malang dan Ngawi dengan jumlah peserta 75 orang.
- c. Mengadakan bimbingan konsultasi terhadap 50 perusahaan yang berskala kecil sebanyak 10 kali dan 1 perusahaan menengah sebanyak 18 kali.

4. Pengembangan Metode dan Pengukuran Produktivitas.
 - a. Mengadakan penerapan dan pembinaan model desa produktif terhadap 10 desa se Jawa Timur dengan kriteria Desa Industri, Desa Perkebunan, Desa Perdagangan, Desa Nelayan, dan Desa Pertanian.
 - b. Mengadakan pengukuran dan analisa produktivitas sektoral dan regional pada 5 sektor yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Listrik Gas dan Air minum, sektor Bangunan, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan sektor Bank dan lembaga keuangan.
 - c. Mengadakan produktivitas perusahaan yang dilakukan terhadap 5 perusahaan Garmen di Jawa Timur.
 - d. Mengadakan pengukuran produktivitas individu yang dilaksanakan terhadap tenaga kerja di 5 perusahaan pada 4 DATI II yaitu Jombang, Blitar, Sidoarjo dan Tulungagung.
 - e. Mengadakan pengkajian faktor-faktor dominan peningkatan produktivitas yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di perusahaan.
5. Pengembangan Lembaga, Sarana dan Sistem Informasi Produktivitas.
 - a. Mengadakan pembentukan dan pengembangan unit pelayanan produktivitas di 20 perusahaan.
 - b. Mengembangkan sistim informasi produktivitas dengan mengadakan kegiatan pembuatan brosur, buletin dengan nama Bang Pro kerjasama dengan IKP Jawa Timur yang diterbitkan 3 kali, dan membuat Bank Data yang berisi Data Produktivitas Sektoral dan Regional.

BAB III

PERMASALAHAN/HAMBATAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik Rutin maupun Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 di jajaran Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur masih dihadapi berbagai hambatan/permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan baik kuantitas maupun kualitas personil, anggaran, sarana dan fasilitas masih mewarnai dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian hal tersebut secara intern diupayakan pemecahannya semaksimal mungkin.

Permasalahan dan hambatan yang perlu diutarakan antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Ketata-Usahaan:

- a. Ketepatan dan kecepatan surat-menyurat maupun laporan yang masih belum memenuhi harapan, terutama dalam melayani permintaan-permintaan dari luar jajaran Kanwil yang seringkali mendesak atau bahkan sudah terlambat.
- b. Alokasi personil baik staf maupun pejabat fungsional masih belum cukup tertata dengan baik sehubungan dengan beberapa hal, antara lain:
 - perpindahan personil dari dan kedalam wilayah Jawa Timur.
 - perkembangan dan kemajuan yang terjadi di daerah-daerah tingkat II.
 - Rencana dan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi BLK/KLK.
 - pelaksanaan Otoda Tingkat II.
- c. PLOting/alokasi anggaran baik Rutin maupun Pembangunan yang belum cukup proporsional, sehingga sering terjadi satu program/kegiatan cukup berlebih akan tetapi program kegiatan lain sangat minim.

2. Bidang Pembinaan Program.

Perolehan dukungan data dari instansi lain yang berkaitan dengan pembuatan Perencanaan Tenaga Kerja masih sangat sulit dipenuhi dan lamban.

3. Bidang pelatihan dan Produktivitas.

- a. Informasi tentang kebutuhan pelatihan untuk berbagai jabatan dan berbagai sektor usaha dan sektor-sektor lainnya masih cukup sulit diperoleh, sehingga pelaksanaan latihan di BLK/KLK/LLS/Ponpes masih belum sepenuhnya mengacu pada bidang jabatan yang sesuai.
- b. Pelatihan yang dilaksanakan di BLK/KLK/LLS/Ponpes masih bersifat Basic Skill sehingga memerlukan program latihan lanjutan oleh penyelenggara latihan lanjutan utamanya pihak swasta dan perusahaan.
- c. Masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian besar pengusaha akan arti pentingnya program peningkatan produktivitas maupun program dan kegiatan pelatihan termasuk Pemagangan. ✓

4. Bidang Pentakerja.

- a. Mekanisme pasar kerja dalam masyarakat belum berfungsi sepenuhnya karena sebagian besar perusahaan belum menyadari dan mentaati wajib lapor lowongan pekerjaan sesuai dengan Keppres no 4 Tahun 1981, meskipun upaya penyuluhan dan pengawasannya secara terus menerus dilakukan.
- b. Kurang dukungan dari sebagian pimpinan lembaga/unit tempat berdirinya BKK sehingga kesulitan dalam operasional, terutama modal awal, dan ada beberapa lembaga yang telah mengirimkan petugas untuk mengikuti pemanduan Bursa Kerja yang sampai saat ini belum juga membentuk BKK selain itu keberadaan BKK belum dipahami dan dimanfaatkan oleh alumni maupun tenaga kerja.

- c. Banyak pencari kerja atau calon pencari kerja yang belum memahami tentang potensi dirinya maupun persyaratan jabatan yang ada sehingga bilamana memasuki dunia kerja tidak terdapat kesesuaian antara kemampuan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- d. Sulit mendapatkan calon peserta Pemuda Motivator Transmigrasi yang sudah menikah, disamping itu tenggang waktu menunggu pemberangkatan relatif lama sehingga beberapa Calon PMT mengundurkan diri karena telah mendapat pekerjaan.
- e. Untuk pengembangan usaha para TKPMP/TKMT permodalan merupakan masalah yang mendasar walaupun telah diupayakan berbagai bantuan stimulan.
- f. Masih terdapat kesulitan dalam memilih kader binaan TPK/Penciptaan Usaha Produktif/lokasi dan jenis usaha sehingga kegiatan usaha mandiri sebagai sasaran akhir tersendat.
- g. Khusus dalam pelaksanaan kegiatan Antar Kerja Antar Negara beberapa kendala yang ditemui antara lain :
 - 1. Masih banyak TKI ilegal yang diberangkatkan oleh para calon ke negara Malaysia yang berangkat dengan visa kunjungan.
 - 2. Pemberangkatan TKI ke Negara Timur Tengah masih dipusatkan di Jakarta, sehingga proses desentralisasi sebagaimana dalam Permen maupun Kepmenaker belum berjalan sebagaimana mestinya.
 - 3. Belum ada standart ketentuan yang mengatur cara pengelolaan penampungan Calon TKI sehingga masing-masing PJTKI mengelola tempat penampungan sesuai selera masing-masing.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

- a. Dibiidang Hubungan Industrial hingga saat ini masih diwarnai dengan kendala ataupun hambatan-hambatan seperti pada Tahun-tahun sebelumnya antara lain :
1. Masih ditemui sebagian pengusaha yang belum memahami dan menerapkan dengan penuh kesadaran prinsip-prinsip HIP.
 2. Tingkat pengetahuan dan kemampuan sebagian besar Pengurus Unit Kerja SPSI/SPTP/pekerja masih cukup rendah, utamanya dalam hal :
 - Hak dan kewajiban serta syarat-syarat kerja.
 - Berorganisasi dan Bernegosiasi.
 - Pembinaan dan Peningkatan kesejahteraan para anggota.
 3. Pola kerja dan pola Pembinaan jajaran SPSI, khususnya ditingkat Pengurus Cabang dan Unit Kerja masih belum cukup tertata dengan baik, yaitu sehubungan dengan perubahan organisasi FSPSI sekaligus partner, kondisi demikian akan menjadi faktor tersendiri didalam mewujudkan HIP.
 4. Tumbuh kembangnya LSM ataupun forum-forum yang bergerak dibidang Ketenagakerjaan/Perburuhan yang belum cukup terbina dan terarahkan secara baik.
- b. Tingkat penyelenggaraan diklat dan penyuluhan bagi Pegawai Perantara masih relatif kurang. Disamping itu pola pembinaan karier Pegawai Perantara belum cukup jelas.

5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

1. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha pada umumnya dan sektor industri pada khususnya, maka belum semua perusahaan/tempat kerja terdaftar dan terpantau.

2. Proses penyidikan pelanggaran peraturan perundangan dan utamanya proses BAP belum cukup lancar, dan bahkan untuk beberapa kasus dinyatakan daluwarsa oleh pihak Kejaksaan.
3. Sistem pengolahan data dan informasi serta pelaporan belum cukup mantap dan kurangnya petunjuk-petunjuk dari pusat, utamanya sistem Administrasi pengawasan ketenagakerjaan/terpadu yang berkaitan dengan obyek-obyek teknis pengawasan.
4. Keberadaan Ahli K3 dan Dokter Pemeriksa Kesehatan Badan Tenaga Kerja di perusahaan - perusahaan relatif masih sedikit.
5. Dengan adanya kebijaksanaan dan pelaksanaan Otoda di Dati Tk II menambah beban tugas organisasi ditingkat Kanwil utamanya bidang Pengawasan.

BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

I. Bidang Ketata Usahaan.

- a. Tugas dan fungsi jajaran Tata Usaha sebagai unit pendukung bidang dan kegiatan Tehnis dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Hal tersebut terlihat dari antara lain :
 - Peningkatan jumlah surat baik masuk maupun keluar.
 - Pemenuhan terhadap permintaan yang mendesak baik dari pusat maupun instansi lain.
 - Tertibnya penyelenggaraan dan pelaporan Rapim dan Rakor.
 - Penetapan dan pengusulan Angka Kredit bagi pejabat fungsional.
 - Daftar Urutan Kepangkatan.
- b. Pembinaan personil dan lingkungan tempat kerja menjadi semakin baik, hal ini terlihat dari :
 - Penyelenggaraan apel pagi maupun sore yang semakin lebih baik.
 - Tingkat kehadiran yang semakin tinggi.
 - Lingkungan kerja yang semakin tertib, bersih dan tertata.
 - pemindaahan terhadap personil yang indisipliner ataupun yang melakukan pelanggaran.
- c. Kemajuan dan peningkatan tersebut huruf a dan b diatas dimungkinkan karena upaya penyempurnaan-penyempurnaa antara lain dibidang surat menyurat, mengatifkan tim-tim baku yang ada (Tim Penilai Angka Kredit, Tim Tindak Lanjut, Tim Wasop-Wasmin) serta penciptaan iklim kebersamaan.

2. Bidang Binagram.

- a. Meskipun akurasi dan kecepatan, ketepatan laporan dan informasi baik dari intern jajaran Kanwil Depnaker maupun dari instansi lain masih merupakan kendala yang perlu ditindak lanjuti dan ditingkatkan, akan tetapi selama T.A 1995/1996 telah mampu diatasi.
- b. Dalam rangka pembentukan dan penyusunan RTKD Tk I baik untuk Pelita VI maupun PJP ke II sangat tergantung peran serta dan keterlibatan secara aktif berbagai instansi dan sektor. Disamping itu pedoman-pedoman dari pusat yang dalam hal tertentu mengalami perubahan-perubahan, tidak jarang menimbulkan kesulitan dalam proses penyusunannya. Namun demikian RTKD dimaksud telah dapat diselesaikan dengan lebih baik.
- c. Mekanisme dan proses penyusunan DUP, DUK dan Renlakgiat semakin lebih baik dan tepat waktu. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena pertemuan-pertemuan konsolidasi perbidang dilakukan lebih sering dan lebih dini, meskipun proses perencanaan bottom up belum berjalan sempurna.

3. Bidang Pelatihan dan Produktifitas.

Berdasarkan perbandingan hasil kegiatan tahun anggaran 1994/1995 dengan realisasi kegiatan program 1995/1996 maka dapat dianalisa bahwa secara umum perkembangan pelatihan dapat menunjukkan kemajuan yang cukup berarti.

Hal ini dapat dibuktikan melalui peningkatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kesadaran perusahaan dalam ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelatihan melalui tumbuhnya unit-unit pengembangan latihan perusahaan (CGTU) yang saat ini telah terbentuk sejumlah 22 perusahaan yang didukung biaya pelatihan dari proyek pengembangan pelatihan (SDP) Jawa Timur.

- b. Kesadaran perusahaan dalam ikut menyelenggarakan program WLTKP dan IWLTKP cukup tinggi, hal ini dapat ditunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang seharusnya di daftar sejumlah 3.000 perusahaan sedangkan yang telah memenuhi IWLTKP sebesar 2.114 perusahaan dan telah terselenggara pelatihan sejumlah 79 angkatan dengan peserta 1.925 orang pekerja.
- c. Pendirian Lembaga Latihan swasta meningkat 21% atau sejumlah 125 Lembaga, yang berarti bahwa bisnis pelatihan semakin tahun nampak lebih menarik.
- d. Pelaksanaan pemagangan meningkat sebesar 15% dibanding tahun anggaran 1994/1995, sementara kepesertaan dari perusahaan cukup membanggakan yang pada tahun 1995/1996 telah terlibat sebesar 97 Perusahaan dan 745 orang peserta magang.
- e. Kesadaran Lembaga Pelatihan swasta untuk mengevaluasi pelatihan baik melalui Ujian Lokal maupun Uji Ketrampilan sudah nampak cukup tinggi, hal ini terlihat bahwa pada akhir T.A. 1994/1995 jumlah lulusan 641 Lembaga Latihan swasta yang telah memegang Sertifikat Pelatihan adalah sejumlah 13.109 orang, sedangkan pada tahun 1995/1996 sudah mencapai 30.726 orang atau lebih dari 100%.
- f. Pembinaan terhadap produktivitas Tenaga Kerja tahun anggaran 1995/1996 juga meningkat cukup pesat, karena pada tahun 1994/1995 dan tahun-tahun sebelumnya lulusan pelatihan MTU dan Pondok Pesantren belum pernah diberikan pelatihan Achievement Motivation Training (AMT), akan tetapi pada tahun 1995/1996 pelatihan AMT dan penyuluhan usaha mandiri telah dilakukan pada peserta pelatihan MTU, Pondok Pesantren dan Perusahaan.
- g. Pembinaan Instruktur masih belum meningkat, walaupun telah diupayakan pembinaan Instruktur melalui Up Grading, OJT, TOT dan pembinaan lainnya, akan tetapi belum ada perubahan yang berarti.

h. Pembinaan terhadap BLK/KLK/BPPD sudah sangat intensif yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelatihan dan pengawasan internnya, akan tetapi belum memperoleh hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan masih adanya berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Latihan dan Proditivitas, maka untuk selanjutnya terdapat berbagai alternatif pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan KKK secara mikro disetiap Industri di daerah dan dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan usulan proyek T.A berikutnya melalui PTKD.
2. Optimalisasi fungsionalisasi terhadap penyelenggara latihan utamanya pihak training centre perusahaan dan LLS untuk membuat suatu program pelatihan tingkat madya dan utama.
3. Optimalisasi penyebarluasan informasi pelatihan keseluruhan lapisan masyarakat di daerah melalui : mass media cetak maupun elektronik.
4. Optimalisasi fungsionalisasi kemitraan dengan pihak ketiga Dunia Usaha, dan dunia Industri dalam rangka pelaksanaan program latihan pemagangan dan penempatan.
5. Optimalisasi fungsionalisasi IPK dan BKK yang dimiliki oleh LLS, Perusahaan dan Lembaga Pendidikan Formal dalam program pemagangan dan penempatan.
6. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan terhadap instruktur melalui penataran/latihan teknis dibidangnya.
7. Optimalisasi dan mobilitas sumberdaya latihan sesuai dengan program latihan-latihan yang dilaksanakan termasuk program sertifikasi dan lisensi.

4. Bidang Penta kerja.

a. Kegiatan penempatan dan penyaluran tenaga kerja.

1. Jumlah penempatan dibanding dengan Tahun Anggaran 1994/1995 mengalami kenaikan sebesar 590 orang atau 1,10 %, sedangkan jumlah lowongan terdaftar dibanding Tahun Anggaran 1994/1995 mengalami kenaikan sebesar 16.088 orang atau 19,3 %. Dalam hal penempatan dan penyaluran tenaga kerja masih dipenuhi. Adanya kesenjangan struktural dalam pasar kerja dimana lowongan sejumlah 20.874 orang tidak dapat diisi oleh pencari kerja disebabkan adanya perbedaan antara persyaratan jabatan dengan kualifikasi dan aspirasi pencari kerja khususnya pencari kerja usia muda.
2. Bahwa keberadaan Bursa Kerja Khusus dapat mengurangi permasalahan pengangguran, khususnya alumni dari lembaga tersebut, terbukti ada beberapa pencaker di BKK telah berhasil disalurkan dan ditempatkan dalam dunia kerja. Untuk selanjutnya perlu selalu dilakukan pembinaan terhadap lembaga/unit yang telah mengikuti pemanduan bursa kerja agar segera membentuk satuan BKK di unitnya masing-masing.
3. Program penyuluhan dan bimbingan jabatan masih perlu terus dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait, terbukti dari penyuluhan dan bimbingan jabatan dapat meningkatkan penempatan secara cepat dan tepat pada dunia kerja. Dari hasil kampanye analisa jabatan yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat dimengerti dan dipahami serta ditindak lanjuti pelaksanaannya oleh kalangan pengusaha dalam rangka pengisian tenaga kerja di perusahaannya.
4. Wilayah Jawa Timur adalah merupakan daerah potensial calon TKI untuk program AKAN. Target pengiriman TKI dalam T.A 1995/1996 telah dapat dicapai 100% yaitu 24.610 orang atau mengalami kenaikan 138,04% dari tahun sebelumnya. Upaya untuk meringankan beban

biaya dan karena merupakan daerah potensial, maka alternatif pemberangkatan TKI ke Timur Tengah melalui Surabaya perlu mendapatkan pemikiran. Disamping itu perlindungan terhadap calon TKI dinilai meningkat karena upaya pembatasan terhadap para calo terus dilakukan, demikian juga pembinaan terhadap PJTKI dan pengawasan terhadap tempat penampungan dan Balai Latihan Kerja senantiasa diintensifkan.

b. Pengerahan TKPMP/TKMT.

1. Kegiatan pembentukan TKPMP di Jawa Timur dalam Tahun Anggaran 1995/1996 telah sesuai dengan yang tersedia didalam anggaran pembangunan hanya terdapat kegiatan pembinaan lanjutan 39 TKPMP IDT sedangkan rekrut TKPMP reguler dan transmigrasi tidak ada, sedangkan pembentukan TKPMP melalui Perguruan Tinggi tidak dapat dilaksanakan sehingga di blokir, tahun lalu terdapat penugasan TKPMP A V sebanyak 325 orang di Jawa Timur.
2. Dari pembentukan TKMT Tahun Anggaran 1995/1996 sebanyak 114 orang telah merintis usaha sebagai pengusaha pemula dan sebagian telah berkembang, dari kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja langsung 2.523 orang, tahun lalu target TKMT di Jawa Timur 197 orang, menyerap 396 tenaga kerja langsung. Kegiatan perluasan kerja melalui penerpan TPK T.A 1995/1996 di 24 Kandeptaker dapat menyerap 600 orang kader sedang tahun sebelumnya dari kegiatan ini telah dapat menyerap 480 kader. Pengembangan kesempatan berusaha melalui penciptaan usaha produktif (PUP) T.A 1995/1996 ini merupakan pilot proyek tahun pertama di 5 Kandeptaker, telah dapat menyerap tenaga kerja 100 kader sedangkan sebelumnya tidak ada, kegiatan ini merupakan pengganti Padat Karya.

- c. Untuk kegiatan pembangunan dibidang Penta Kerja secara umum dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target sebagaimana ditetapkan.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

- a. Secara garis besar dinilai bahwa kondisi hubungan industrial di Jawa Timur cukup aman dan terkendali. Hal tersebut dapat terlihat antara lain dari penurunan jumlah kasus unjuk rasa pekerja dan kecilnya angka perusahaan yang mengajukan penangguhan UMR.
- b. Pembentukan sarana HIP khususnya Unit Kerja SPSI dan KKB belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu 75 % dari jumlah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang pekerja. Namun demikian bila dibandingkan hasil tahun 1994/1995 telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.
- c. Penyebab unjuk rasa pekerja yang terjadi pada Tahun Anggaran 1995/1996 ini telah menunjukkan pergeseran dari hal-hal yang bersifat normatif ke non normatif atau hal-hal yang bersifat kepentingan. Diidentifikasi adanya perselisihan /unjuk rasa yang penyelesaiannya cukup sulit, berlarut dan meluas. Hal tersebut diperkirakan adanya pengaruh ataupun keterlibatan pihak ke III.
- d. Dalam hal penanggulangan gejolak ketenagakerjaan, keterlibatan instansi dan aparat yang terkait cukup terbina dan selalu diupayakan peningkatannya, sehingga gejolak /unjuk rasa pekerja dapat diatasi dengan cepat dan terkoordinir serta tidak meluas.
- e. Memperhatikan kondisi dunia usaha untuk beberapa sektor tertentu yang kurang menguntungkan , dan disisi lain kebutuhan hidup pekerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, setta didorong semakin tumbuh dan berkebangnya LSM maupun forum-forum tertentu yang bernotif dan memiliki kepentingan lain, maka diperkirakan bahwa perselisihan yang sampai ditingkat P4D maupun P4P akan

lebih meningkat. Sehubungan dengan itu penataan dan dukungan terhadap lembaga P4D perlu mendapat perhatian.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

- a. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya dunia usaha pada umumnya dan sektor industri pada khususnya merupakan tantangan tersendiri bagi jajaran pengawasan untuk lebih memperluas jangkauan pengawasan/pemeriksaan yang telah ada selama ini. Jangkauan pengawasan dalam T.A 1995/1996 telah mengalami peningkatan 5,45 % termasuk pembuatan laporannya. Namun demikian target pemeriksaan perpegawai pengawas belum tercapai sepenuhnya.
- b. Dengan peningkatan intensitas pengawasan yang dilakukan telah sedikit banyak memberikan warna dan perubahan pada kondisi penerapan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Namun demikian masih terdapat pula perusahaan-perusahaan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai yang akibat kurangnya kesadaran dan untuk beberapa kasus dikarenakan kondisi usahanya yang kurang menguntungkan, sehubungan dengan itu upaya pembinaan dan penegakan hukum /penyidikan harus diupayakan, walaupun jumlahnya memurun bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal pengajuan kasus ke Pengadilan masih belum cukup lancar, dan untuk itu pula kerjasama dan koordinasi khususnya dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan tetap diupayakan.
- c. Perlindungan tenaga kerja atas Jamsostek telah diupayakan dan hasilnya cukup meningkat dimana dalam tahun 1995 telah bertambah 818 perusahaan dan 244.806 orang pekerja sebagai peserta Jamsostek. Sedangkan untuk tahun 1996 (Januari s/d Maret) bertambah 172 perusahaan dengan 20.873 orang pekerja. Hingga saat ini tercatat kepesertaan Jamsostek 7.668 Perusahaan dengan 1.100.968 orang pekerja. Namun demikian jumlah tersebut baru mencapai + 53% dari jumlah perusahaan yang wajib melaksanakan program Jamsostek.

- d. Kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi dinilai masih cukup tinggi yaitu 8.850 kasus (data dari PT Jamsostek 11.322 kasus). Hal tersebut dimungkinkan karena kesadaran akan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan K3 baik dari pihak pengusaha maupun pekerja masih belum cukup tinggi. Dalam hal tersebut termasuk pembentukan P2K3, Ahli K3 dan Dokter perusahaan yang belum cukup meluas. Sehubungan dengan itu upaya penyuluhan/pembinaan dan pengawasan aspek K3 perlu ditingkatkan, demikian pula peningkatan profesionalisme Pegawai Pengawas dibidang K3 dan teknisi Hyperkes. Disamping itu peningkatan penelitian dan pengujian dibidang Hyperkes perlu terus dilakukan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jajaran Ketata-Usahaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penunjang operasional bidang teknis semakin menjadi lebih baik atau meningkat. Hal tersebut baik dalam sistem surat-menyurat, pembinaan personil, maupun kebersihan, keindahan bangunan dan lingkungan. Walaupun demikian masih diakui bahwa upayanya perlu terus ditingkatkan.
2. Meskipun masih terdapat kendala/hambatan dibidang pembinaan rencana dan program, namun dalam tahun anggaran 1995/1996 telah banyak kemajuan yang dicapai, baik dalam penyusunan DUP, DUK dan renlakgiat maupun dalam penyusunan Rencana Kerja Tenaga Daerah.
3. Target-target di bidang Pelatihan dan Produktivitas telah dapat dicapai dengan baik. Disamping itu keterlibatan dan peran serta masyarakat dan pihak ketiga semakin meningkat. Penyelenggaraan pelatihan yang mengacu pada penempatan dan atau pelatihan pada tingkat middle skill masih merupakan tantangan yang perlu terus diupayakan.
4. Kegiatan dan program yang berkaitan dengan antar kerja, pembinaan TKMT dan TKPMP secara umum telah mencapai target dan menunjukkan peningkatan-peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Khususnya penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui program AKAN menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Disamping itu upaya untuk memberikan perlindungan sebelum mereka diberangkatkan telah diupayakan melalui berbagai cara.
5. Kondisi hubungan industrial di Jawa Timur dinilai cukup aman dan terkendali walaupun diwarnai kasus-kasus unjuk rasa pekerja. Penyebab unjuk rasa pekerja telah mengalami pergeseran dari hal-hal yang bersifat normatif

ke hal-hal yang bersifat kepentingan. Maraknya kasus unjuk rasa di Jawa Timur diidentifikasi oleh berbagai pihak adanya pihak-pihak tertentu dengan motif tertentu pula. Dalam penanggulangan kasusnya untuk sementara ini dinilai cukup terkoordinasikan antara berbagai pihak/instansi terkait.

6. Perlindungan tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai semakin lebih baik kondisinya. Hal tersebut dimungkinkan sehubungan dengan:

- perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pengawasan.
- peningkatan disiplin dan kualitas Pegawai Pengawas melalui berbagai forum pertemuan secara intern.
- evaluasi hasil kegiatan pemeriksaan.

Peningkatan kondisi dimaksud terlihat pula dari ketaatan para pengusaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hak dasar pekerja/UMR. Walaupun demikian diakui masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan karena kurangnya kesadaran pihak pengusaha maupun karena kondisi usahanya yang kurang menguntungkan.

7. Secara umum kegiatan baik rutin maupun pembangunan di jajaran Kanwil Depnaker Jawa Timur dapat berlangsung dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan baik fisik maupun keuangannya.

B. Saran.

1. Agar dapat ditingkatkan penyelenggaraan diklat/penyuluhan khususnya bagi para pejabat fungsional. Demikian pula pola pembinaan kariernya.
2. Agar plotting/alokasi anggaran baik rutin maupun pembangunan lebih proporsional sesuai usulan.
3. Diharapkan adanya petunjuk sehubungan dengan reformasi pelatihan di BLK/KLK.

4. Agar kiranya Surabaya dapat ditetapkan sebagai tempat pemberangkatan TKI ke Luar Negeri khususnya ke wilayah Timur Tengah dalam rangka meringankan beban bagi para calon.
5. Pengaturan mekanisme dan pola pembinaan organisasi pekerja, khususnya yang berkaitan dengan Check of System perlu penetapan/penegasan sehubungan dengan perubahan organisasi F.S.P.S.I.
6. Perlu pengaturan tentang pengorganisasian di Bidang Pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan Otoda Dati II.

Surabaya, April 1996

KANWIL DEPNAKER PROPINSI JAWA TIMUR

TABEL I
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KANTOR

NO	URAIAN	JUMLAH
	PERBAIKAN/SERVIS	
1	A C	6 Unit
2	Pompa Air	2 Unit
3	Tape Recorder	1 Buah
4	Mesin Stensil Folio	2 Unit
5	Servis Karpet	2 Lembar
6	Plitur Meja kayu	10 Buah
7	Perbaikan Instalasi Listrik	Kabel, dll

TABEL II
PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pembelian Lemari Kayu	4 Unit
2	Pembelian Microphone AOI	2 Unit
3	Pembelian Meja Kayu	11 Buah
4	Pembelian Amplifyer TOA	1 Unit
5	Pembelian Speaker	5 Buah
6	Pembelian Box Speaker Plitur Meja kayu	2 Buah
7	Pembelian Rambu Lalu Lintas	8 Buah
8	Pembelian Pompa Air	1 Buah
9	Pembelian Kursi Kerja dari Besi	15 Buah
10	Pembelian Papan Pengumuman	9 Buah
11	Pembelian Kipas Angin	7 Buah
12	Pembelian Radio Kaset	1 Buah
13	Cetak Blanko	--
14	Pengadaan Foto Copy	--

DATA PESERTA PELATIHAN PEMAGANGAN

PROPINSI JAWA TIMUR

NO	KANDEPNAKER	1994/1995		1995/1996	
		PERUSH	PESERTA	PERUSH	PESERTA
1	SURABAYA	7	81	8	45
2	SIDOARJO	16	145	6	47
3	MOJOKERTO	1	5	1	5
4	MALANG	22	125	9	34
5	KEDIRI	3	22	1	9
6	JEMBER	12	73	5	29
7	BLITAR	6	23	5	36
8	BANYUWANGI	1	2	1	3
9	MADIUN	3	65	---	---
10	BOJONEGORO	1	10	---	---
11	PAMEKASAN	---	---	---	---
12	TUBAN	---	---	7	96
13	SITUBONDO	12	71	---	---
14	GRESIK	1	55	1	3
15	SUMENEP	2	20	1	1
16	BANGKALAN	---	---	---	---
17	TULUNGAGUNG	3	16	---	---
18	JOMBANG	---	---	---	---
19	NGANJUK	---	---	---	---
20	PROBOLINGGO	2	21	---	---
21	PASURUAN	22	205	11	272
22	LUMAJANG	1	10	---	---
23	PONOROGO	---	---	---	---
24	PACITAN	1	5	---	---
JUMLAH		116	954	56	580

DATA LLS DI JAWA TIMUR

NO	KANDEPNAKER	1994/1995	1995/1996
1	SURABAYA	116	125
2	SIDOARJO	38	40
3	MOJOKERTO	21	22
4	MALANG	56	64
5	KEDIRI	52	56
6	JEMBER	33	40
7	BLITAR	28	30
8	BANYUWANGI	31	32
9	MADIUN	29	42
10	BOJONEGORO	17	21
11	PAMEKASAN	22	23
12	TUBAN	2	5
13	SITUBONDO	5	5
14	GRESIK	7	7
15	SUMENEP	8	8
16	BANGKALAN	3	4
17	TULUNGAGUNG	56	60
18	JOMBANG	25	28
19	NGANJUK	13	14
20	PROBOLINGGO	18	19
21	LUMAJANG	13	16
22	PONOROGO	30	31
23	PACITAN	3	4
24	PASURUAN	18	20
JUMLAH		644	716

Tabel 4

DATA PHI DAN PHK

PROPINSI JAWA TIMUR

NOMO	KANDEPNAKER	APRIL 1995 S / D MARET 1996					
		PHI UU 22 / 1957			PHK UU 12 / 1964		
		MASUK	SELESAI	SISA	MASUK	SELESAI	SISA
1	SURABAYA	32	9	23	398	139	259
2	SIDOARJO	----	----	----	76	20	56
3	MOJOKERTO	1	----	1	1	----	1
4	MALANG	6	6	----	72	72	----
5	KEDIRI	6	6	----	24	24	----
6	JEMBER	4	----	4	4	----	4
7	BLITAR	10	10	----	10	10	----
8	BANYUWANGI	5	5	----	6	6	----
9	MADIUN	1	1	----	27	27	----
10	BOJONEGORO	12	10	2	13	11	2
11	PAMEKASAN	----	----	----	7	6	1
12	TUBAN	4	3	1	5	4	1
13	SITUBONDO	4	3	1	4	3	1
14	GRESIK	1	1	----	81	75	6
15	SUMENEP	1	1	----	2	2	----
16	BANGKALAN	----	----	----	----	----	----
17	TULUNGAGUNG	2	2	----	2	2	----
18	JOMBANG	----	----	----	9	9	----
19	NGANJUK	1	----	1	2	1	1
20	PROBOLINGGO	4	3	1	66	42	24
21	PASURUAN	5	5	----	41	40	1
22	LUMAJANG	10	8	2	10	8	2
23	PONOROGO	2	1	1	2	1	1
24	PACITAN	----	----	----	1	1	----
J U M L A H		111	74	37	863	503	360

Tabel 5

DATA PHK MASSAL (10 ORANG KE ATAS)

DI PROPINSI JAWA TIMUR

NOMO	KANDEPNAKER	KASUS MASUK	TENAGA KERJA	KASUS SELESAI	TENAGA KERJA	SISA KASUS	TENAGA KERJA
1	SURABAYA	6	713	1	12	5	701
2	SIDOARJO	3	175	----	----	3	175
3	PASURUAN	1	12	----	----	1	12
4	PROBOLINGGO	2	146	----	----	2	146
5	BANYUWANGI	1	60	----	----	1	60
6	KEDIRI	3	571	1	42	2	529
J U M L A H		16	1677	2	54	14	1623

Tabel 6

DATA UNJUK RASA / PEMOGOKAN

TAHUN 1995 / 1996

NO	KANDEPNAKER	JUMLAH KASUS	JUMLAH TK YANG TERLIBAT	JUMLAH JAM KERJA YANG HILANG
1	SURABAYA	69	23.845	532.775
2	SIDOARJO	55	30.021	363.010
3	MOJOKERTO	12	5.247	34.736
4	MALANG	9	2.033	10.544
5	KEDIRI	2	309	2.786
6	JEMBER	----	----	----
7	BLITAR	----	----	----
8	BANYUWANGI	1	31	217
9	MADIUN	3	745	12.805
10	BOJONEGORO	----	----	----
11	PAMEKASAN	----	----	----
12	TUBAN	----	----	----
13	SITUBONDO	1	40	280
14	GRESIK	25	10.376	162.406
15	SUMENEP	----	----	----
16	BANGKALAN	----	----	----
17	TULUNGAGUNG	2	211	4.884
18	JOMBANG	6	8.889	66.665
19	NGANJUK	----	----	----
20	PROBOLINGGO	3	750	9.300
21	PASURUAN	5	2.162	38.739
22	LUMAJANG	----	----	----
23	PONOROGO	----	----	----
24	PACITAN	----	----	----
JUMLAH		193	84.659	1.239.147

Tabel 7

DATA SEKTORAL DI JAWA TIMUR

NOMOR	SEKTOR	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA	UK-SPSI	C O S	LKS BIPARTITE	P P	K K B	P 4 DAN HIP		TENAGA KERJA	C U T I			K 3	ASTEK	KOPKAR
									PENGUSAHA	UK-SPSI		TAHUNAN	HAIO	MELA-HIRKAN			
1	INDUSTRI	308	86499	141	98	87	150	65	695	765	6865	243	308	373	287	215	117
2	JASA	189	11099	43	37	35	85	28	75	57	478	156	103	87	96	90	46
3	PERDAGANGAN	156	7063	19	9	11	73	9	33	66	537	71	66	44	75	57	10
4	ANGKUTAN	21	5013	12		10	10	9	25	17	60	14	15	7	16	20	16
5	PERKEBUNAN	59	27463	33	34	30	16	25	22	79	3677	131	36	88	29	30	32
6	PETERNAKAN/PERIKANAN	7	358	2	4	1	2	1	9	5	19	4	3	4	5	5	1
7	BANGUNAN	22	1052	4	1	2	10	4	15	10	27	13	10	3	6	14	2
8	LISTRIK, GAS DAN AIR	2	80				1		5		19						
9	KEUANGAN	11	611	1			5	1	6		18	5	16	6	3		2
JUMLAH		775	140205	255	183	176	361	165	605	1000	11670	635	551	592	497	431	233

Tabel 8

PERIJINAN DIBIDANG KESELAMATAN KERJA DI JAWA TIMUR

NOMOR	I T E M	1994/1995	1995/1996	PRESENTASI NAIK
1	PESAWAT UAP	225	275	18,00
2	BEJANA TEKAN	174	328	46,90
3	PESAWAT ANGKAT	153	203	24,60
4	INSTALASI LISTRIK	45	139	67,60
5	PEMAKAIAN DIESEL	125	83	Permohonan diterima dari Kandepnaker dan diteruskan ke Jakarta.
6	PENGESAHAN INSTALAS KEBAKARAN	1	3	66,67

Tabel 9

No.	Sektor Industri	CO		NO _x		SO ₂		H ₂ S		NH ₃		O ₃		DEBU	
		Jml Lks	> Std	Jml Lks	> Std	Jml Lks	> Std	Jml Lks	> Std	Jml Lks	> Std	Jml Lks	> Std	Jml Lks	> Std
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Sektor industri pengo- lahan :														
a.	Sub. Golongan indus- tri gula pasir. (Amb & Stk)														
	01. PG.Asem Bagus.	12	--	12	03	12	--	06	04	06	--	06	--	12	07
	02. PG.Dee Mas.	06	--	06	01	06	--	06	--	06	--	06	--	06	04
	03. PG.Gempol Krep.	12	--	12	--	12	--	09	--	09	06	09	--	12	03
	04. PG.Jombang Baru.	15	--	15	05	15	--	09	--	09	01	09	--	15	06
	05. PG.Jatiroto.	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	07
	06. PG.Krian.	12	--	12	--	12	--	09	--	09	--	09	--	12	04
	07. PG.Kebon Agung.	12	--	12	--	12	--	12	--	12	--	12	02	12	07
	08. PG.Kedawang.	09	--	09	01	09	--	09	--	09	--	09	--	09	07
	09. PG.Kreabung.	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	03
	10. PG.Kanigoro.	12	--	12	01	12	--	06	06	06	--	06	--	12	05
	11. PG.Krebet Baru.	12	--	12	06	12	--	12	--	12	02	12	--	12	10
	12. PG.Lestari.	15	--	15	--	15	--	15	--	15	04	15	--	15	12
	13. PG.Meritjan.	11	--	11	--	11	--	11	--	11	02	11	--	11	06
	14. PG.Mojopanggung.	12	--	12	--	12	--	12	--	12	--	12	--	12	06
	15. PG.Ngadirejo.	12	--	12	--	12	--	12	--	12	01	12	--	12	04
	16. PG.Olean.	02	--	02	--	02	--	02	--	02	--	02	--	02	--
	17. PG.Purwodadi.	09	--	09	03	09	--	06	01	06	--	06	--	09	03
	18. PG.Pagotan.	12	--	12	03	12	--	06	--	06	--	06	--	12	06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	19. PG.Pesantren.	12	--	12	--	12	--	12	--	12	05	12	--	12	10
	20. PG.Prajekan.	09	--	09	05	09	01	09	--	09	02	09	--	09	05
	21. PG.Pajarakan.	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--
	22. PG.Rejo Agung.	08	--	08	--	08	--	08	--	08	--	08	--	08	03
	23. PG.Rejonari.	09	--	09	06	09	--	06	02	06	--	06	--	09	05
	24. PG.Sudono.	12	--	12	03	12	--	06	--	06	--	06	--	12	07
	25. PG.Semboro.	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	02
	26. PG.Tulangan.	10	--	10	--	03	--	09	--	09	--	09	--	09	03
	27. PG.Tjandi.	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--	09	--
	28. PG.Tjoekir.	09	--	09	01	09	--	09	--	09	--	09	--	09	06
	29. PG.Wringin Anom.	06	--	06	03	06	--	06	--	06	--	06	--	06	04
	30. PG.Watutulis.	12	--	12	--	12	--	12	--	12	03	12	--	12	07
b.	Sub. Golongan industri kertas. (Amb+Stk)														
	1. PT. Pakerin.	28	01	37	03	37	02	06	--	18	03	06	--	37	03
	2. PT. Kertas Lece.	07	--	07	--	07	--	--	--	07	--	07	--	06	06
	3. PT. Basuki Rahmat	03	--	03	--	03	--	03	--	03	--	03	--	03	--
c.	Sub. Golongan Industri kimia dasar an organik klor & alkali. (Amb+Lkk)														
	1. PT. Lika Telaga.	12	--	12	--	12	--	--	--	--	--	--	--	12	--
	2. PT. Pulo Indah.	15	--	15	04	15	--	--	--	15	--	--	--	15	07
d.	Sub. Golongan Industri barang perhiasan berharga termasuk dari logam mulia. (Ambien)														
	PT. Yamamori.	05	--	05	--	05	--	--	--	--	--	--	--	05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
e.	Sub. Golongan Industri Lumber masak. (Amb & Lkk) PT. Choil Samung Astra.	15		15	00	15								15	00
f.	Sub. Golongan Industri alat listrik dan komponen lainnya. (Ambien) 1. PT. Aneka Rekasa Isolator Indonesia. 2. PT. Aneka Danusakti.	04		04	00	04				04				04	
g.	Sub. Golongan Industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu (gum dan wood chemicals). (Amb, Stk & Lkk) PT. Surya Mahakam Agung Chemical Co.	15		15		15								15	
h.	Sub. Golongan Industri pengecoran besi baja. (Amb+Stk) 1. PT. Hanil Jaya MW. 2. PT. Jatim taman Steel. 3. PT. Baduran Jaya.	21		21	02	21		21	01	21		21		21	05
		17		17	06	17		14		08				17	
i.	Sub. Golongan Industri kayu lapis. (Amb+Lkk) PT. Nusantara Plywood	15		15	00	15				15				15	00
j.	Sub. Golongan Industri makaroni, spaghetti, bahan, sosis dan sejenisnya. (Stk+Amb) PT. Indofood Sukses Makmur.	09		09		09		09		09		09		09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
k.	Sub. Golongan Industri kosmetika. (Amb+Ldk) PT. Pabrik Farmasi "VITA".	03	—	03	—	03	—	—	—	03	—	—	—	03	01
l.	Sub. Golongan Industri barang logam lainnya. (Amb) PT. Indospring.	06	—	06	—	06	—	06	—	06	—	06	—	06	—
m.	Sub. Golongan Industri aki dan komponennya. (Emisi) PT. BS. Jaya.	02	—	—	—	02	—	—	—	—	—	—	—	02	—
n.	Sub. Golongan Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih. (Ldk) PT. Malindo Setya Utama.	04	—	04	—	04	—	—	—	—	—	—	—	04	—
o.	Sub. Golongan Industri penggergajian dan pengolahan kayu (Ambien) PT. Primazeta.	12	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—	12	—
p.	Sub. Golongan Industri semen. (Ambien & Emisi) 1. PT. Semen Gresik. 2. PT. Semen Tuban.	24 11	— —	24 11	— 02	24 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	24 11	— 04
q.	Sub. Golongan Industri pengecoran beton baja. (Emisi) PT. Ispatindo.	02	—	02	—	02	—	—	—	—	—	—	—	02	—
r.	Sub. Golongan Industri barang-barang barang keperluan kaki dari karet. (Amb) 1. PT. Golden Rubber Indo. 2. PT. Aneka Jaya Sakti. 3. PT. Nevera Rubber Indo.	06 03 03	— — —	06 03 03	— — —	06 03 03	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	06 03 03	— — —

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	a. Sub. Salungan 1a. Listrik pengecekan 1 Salungan. (Ambien & Emisi) UD. EBC.	05		05		05								05	
II.	Sektor Listrik, Gas dan Air. Sub. Salungan industri listrik. (Ambien & Emisi) PT. PLTU Gresik.	13		13		13								13	
	J U M L A H	846	--	553	67	595	02	323	02	373	27	316	02	554	190

Keterangan : Jml Lks = Jumlah Lokasi.

> Std = Melebihi standar (Berdasarkan SK Sub. th. 1988)

DISPERPUSIP JATIM

SISTEM PENGUPAHAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN / KODYA DI JAWA TIMUR

NOMOR	KABUPATEN/ KODYA	JUMLAH PERUSAHAAN	SISTEM PENGUPAHAN	SESUAI UMR	DIBAWAH UMR	DIATAS UMR
1	MADIUN	41	Harian	Rp. 3.250,-	3 perusahaan	21 perusahaan
		32	Bulanan	Rp. 97.500,-	14 perusahaan	29 perusahaan
		1	Borongan	Rp. 3.250,-	2 perusahaan	15 perusahaan
2	SURABAYA	72	Harian	Rp. 3.700,-	2 perusahaan	14 perusahaan
		31	Bulanan	Rp. 111.000,-	12 perusahaan	43 perusahaan
		6	Borongan	Rp. 3.700,-	3 perusahaan	12 perusahaan
3	MALANG	48	Harian	Rp. 3.700,-	3 perusahaan	15 perusahaan
		27	Bulanan	Rp. 111.000,-	13 perusahaan	37 perusahaan
		4	Borongan	Rp. 3.700,-	2 perusahaan	8 perusahaan
4	PROBOLINGGO	39	Harian	Rp. 3.450,-	2 perusahaan	10 perusahaan
		36	Bulanan	Rp. 103.500,-	7 perusahaan	34 perusahaan
		17	Borongan	Rp. 3.450,-	1 perusahaan	12 perusahaan
5	MOJOKERTO	39	Harian	Rp. 3.700,-	-----	3 perusahaan
		16	Bulanan	Rp. 111.000,-	-----	11 perusahaan
		2	Borongan	Rp. 3.700,-	-----	11 perusahaan
6	SIDOARJO	80	Harian	Rp. 3.700,-	2 perusahaan	14 perusahaan
		52	Bulanan	Rp. 111.000,-	4 perusahaan	37 perusahaan
		8	Borongan	Rp. 3.700,-	-----	16 perusahaan
7	JEMBER	25	Harian	Rp. 3.450,-	20 perusahaan	27 perusahaan
		2	Bulanan	Rp. 103.500,-	6 perusahaan	57 perusahaan
		10	Borongan	Rp. 3.450,-	12 perusahaan	9 perusahaan
8	BANYUWANGI	32	Harian	Rp. 3.450,-	2 perusahaan	24 perusahaan
		39	Bulanan	Rp. 103.500,-	5 perusahaan	28 perusahaan
		18	Borongan	Rp. 3.450,-	15 perusahaan	18 perusahaan